

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA PALEMBANG

Muhammad Adib Putra Budiman

NPP. 31.0232

Asdaf Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: skywalkerrox123@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Jona Bungaran Basuki Sinaga, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Stunting is a significant health problem in Indonesia, including in the city of Palembang. To overcome this problem, Collaborative governance has been adopted as an important approach. **Purpose:** This research aims to describe and analyze Collaborative governance in efforts to reduce stunting rates in Palembang City, with a focus on the process, results and obstacles. Collaborative governance is an approach that involves cooperation between the government, the private sector, civil society organizations and the community in formulate and implement policies or programs. In Palembang City, Collaborative governance to reduce stunting was realized through the formation of a team to accelerate handling of stunting at the city and sub-district levels. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach by utilizing interviews and document analysis. **Result:** The Collaborative governance process begins with an analysis of initial conditions, which includes an understanding of the problem and the role of each stakeholder. Based on Presidential Decree no. 72 of 2021, the Palembang City government has formed a team to accelerate handling of stunting, showing commitment in handling this problem. However, there are obstacles in creating effective collaboration. Differences in understanding and priorities between stakeholders are one of the main obstacles. Each party has a different perspective and focus on the Stunting issue, making it difficult to reach agreement and common goals. Apart from that, less than optimal coordination and communication also become obstacles in the collaboration process. Weak coordination between related agencies at the local government level can reduce the effectiveness of stunting reduction programs. **Conclusion:** Further efforts are needed to improve coordination and communication between all stakeholders to ensure better integration of various stunting management programs. By understanding the dynamics of Collaborative governance in handling Stunting in Palembang City, it can be hoped that there will be improvements in the collaboration process and increased effectiveness of Stunting reduction programs in the future. **Keywords:** Collaborative governance, Stunting, Palembang City, decreasing numbers, obstacles.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting adalah salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Palembang. Untuk mengatasi masalah ini, *Collaborative*

Governance telah diadopsi sebagai pendekatan yang penting. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Collaborative Governance dalam upaya penurunan angka *stunting* di Kota Palembang, dengan fokus pada proses, hasil, dan hambatan-hambatannya. *Collaborative Governance* adalah pendekatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan atau program. Di Kota Palembang, *Collaborative Governance* untuk penurunan *stunting* terwujud melalui pembentukan tim percepatan penanganan *stunting* di tingkat kota dan kecamatan. **Metode:** Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan wawancara dan analisis dokumen. **Hasil temuan:** Proses *Collaborative Governance* diawali dengan analisis kondisi awal, yang mencakup pemahaman akan permasalahan dan peran masing-masing pemangku kepentingan. Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021, pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim percepatan penanganan *Stunting*, menunjukkan komitmen dalam penanganan masalah ini. Namun, terdapat hambatan dalam upaya menciptakan kolaborasi yang efektif. Perbedaan pemahaman dan prioritas antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hambatan utama. Setiap pihak memiliki perspektif dan fokus yang berbeda terhadap isu *Stunting*, sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan dan tujuan bersama. Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang kurang optimal juga menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Koordinasi yang lemah antara dinas-dinas terkait di tingkat pemerintah daerah dapat mengurangi efektivitas program-program penurunan *Stunting*. **Kesimpulan:** Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan guna memastikan integrasi yang lebih baik dari berbagai program penanganan *Stunting*. Dengan memahami dinamika *Collaborative Governance* dalam penanganan *Stunting* di Kota Palembang, dapat diharapkan adanya perbaikan dalam proses kolaborasi dan peningkatan efektivitas program-program penurunan *Stunting* di masa mendatang.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, *Stunting*, Kota Palembang, penurunan angka, hambatan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan merupakan salah satu elemen utama bersama dengan pendidikan dan pendapatan. Pembangunan kesehatan secara keseluruhan dapat dilihat dari beberapa indikator, termasuk angka kematian bayi, angka kematian ibu saat melahirkan, prevalensi gizi kurang, dan harapan hidup (Santrock, 2002). Salah satu permasalahan Kesehatan yang terdapat di Indonesia adalah *Stunting*. *Stunting* merupakan masalah gizi yang bersifat kronis karena menjadi salah satu keadaan mal nutrisi yang memiliki hubungan dengan tidak tercukupinya zat gizi di masa lalu. Beberapa faktor yang menyebabkan *Stunting* adalah pendapatan keluarga, pola asuh, jumlah anggota keluarga, dan tinggi badan orangtua. Unsur lain yang menyebabkan penghambat pertumbuhan adalah kondisi ibu, seperti pengetahuan dan kesehatan ibu dari kehamilan hingga setelah melahirkan, penerapan Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Penambah ASI (MPASI), riwayat penyakit ibu, dan pemenuhan gizi anak. Sanitasi, makanan, dan Akses terhadap layanan kesehatan, serta pekerjaan ibu adalah penyebab tambahan *Stunting* pada anak, menurut (Kemenkes, 2022).

Sumatera Selatan berhasil menjadi salah satu provinsi di Indonesia menurunkan jumlah *Stunting* hingga 5% dalam rentang tahun 2021 sampai 2022. Angka *Stunting* di Kota Palembang mengalami penurunan dari 22,9% pada tahun 2019 menjadi 16,1% pada tahun 2021, dan 14,3% pada tahun 2022. Salah satu tujuan utama Pemerintah Kota Palembang hingga tahun 2024 adalah penurunan angka *Stunting*. Menurut klasifikasi WHO, Palembang tergolong dalam kategori rendah. Namun, menurut EPPGM, dari 117.215 balita yang tercatat, 517 di antaranya mengalami *Stunting*. Tingkat *Stunting* keseluruhan di Kota Palembang hanya mencapai 0,44%. Di wilayah I Ulu, 2,8% dari

892 anak balita memiliki *stunting*, sementara di 2 Ulu prevalensinya 2,7% dari 742 anak balita. Di 26 Ilir, prevalensi mencapai 2,64% dari 720 anak balita, dan di Kertapati, prevalensinya 2% dari 551 anak balita. Dari 107 kelurahan, 13 di antaranya tidak memiliki kasus *stunting*, termasuk Kemang Manis, Komperta, Sei Pangeran, 14 Ilir, 15 Ilir, 16 Ilir, 17 Ilir, Kep. Baru, 20 Ilir II, 11 Ilir, Lebung Gajah, Karya Mulya, dan Talang Jambe. (Dinas Kesehatan Kota Palembang, 2022).



Gambar 1. 1 Prevalensi Stunting Kota Palembang 2019-2022

Meskipun sudah tergolong rendah. Walikota Palembang dalam kegiatan peringatan hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIX di kota Palembang menyatakan angka prevalensi Stunting Palembang ditarget hingga 0 kasus. Pemerintah kota menargetkan kota Palembang menjadi kota bebas Stunting. Untuk mempercepat tercapainya target tersebut diperlukan tata Kelola kolaborasi antar pihak bukan dari pemerintah saja. *Collaborative governance* dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada proses di mana berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, entitas sektor swasta, dan organisasi nirlaba, bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan. Pendekatan ini ditandai dengan pengambilan keputusan bersama dan tanggung jawab bersama, dan sering melibatkan penggunaan data dan teknologi untuk menginformasikan pembuatan kebijakan dan mengevaluasi kinerja. Di Indonesia sendiri khususnya di kota Palembang Sebagai contoh, dalam konteks penanggulangan *Stunting* di Kota Palembang, pemerintah telah menunjukkan *collaborative governance* melalui berbagai inisiatif. Pemerintah telah melaksanakan program-program seperti bantuan CSR dari berbagai organisasi dan program Bapak Asuh *Stunting*, yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan penyediaan bantuan ke anak-anak kurang beruntung.

Penurunan *Stunting* di Kota Palembang dapat dikaitkan dengan sejumlah kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah, yang dimungkinkan melalui *collaborative governance*. Pemerintah telah mengadopsi pendekatan berbasis data dalam pembuatan kebijakan, menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini telah memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus populasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Program "Bapak Asuh *Stunting*", merupakan program berbasis perangkat lunak yang bertujuan untuk membuat orang tua asuh lebih mudah memberikan bantuan anak-anak yang kurang beruntung. Program ini diimplementasikan sebagai hasil dari kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, entitas sektor swasta, dan organisasi nirlaba. Penggunaan teknologi dalam program ini telah memudahkan pemberian bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan, yang menunjukkan efektivitas *collaborative governance* dalam pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan lainnya adalah penyediaan bantuan CSR dari berbagai organisasi seperti PLN, Pertamina, *Rotary Club*, dan Dompot Duafa, untuk memberikan makanan tambahan kepada anak-anak yang mengalami *Stunting*. Selanjutnya, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan komunikasi di antara berbagai pemangku kepentingan, seperti guru dan staf pusat kesehatan, untuk mengubah perilaku. Pemerintah telah menyediakan peralatan USG untuk pusat kesehatan guna mendeteksi dan memantau kondisi kehamilan. Penurunan *Stunting* di Kota Palembang dapat dikaitkan dengan implementasi kebijakan publik yang efektif melalui *collaborative governance*. Pendekatan berbasis data pemerintah dalam pembuatan kebijakan, dikombinasikan dengan partisipasi aktif dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan, telah menghasilkan pengembangan dan implementasi kebijakan yang efektif dalam mempercepat upaya penurunan angka *Stunting*.

Menurut data dari E-PPGBM, prevalensi *Stunting* secara keseluruhan angka *Stunting* di Kota Palembang pada tahun 2019 adalah 7,5% yang kemudian turun menjadi 1,7% pada tahun 2020, 1,1% pada tahun 2021, dan lebih lanjut berkurang menjadi 0,44% dalam verifikasi terbaru pada Agustus 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut cukup efektif dalam mengurangi *Stunting* di Kota Palembang. Program Bapak Asuh *Stunting* dan penyediaan bantuan CSR dari berbagai organisasi telah memainkan peran penting dalam penurunan ini. Program-program ini telah memudahkan pemberian bantuan dan makanan tambahan kepada anak-anak yang mengalami *Stunting*, mengatasi masalah kekurangan gizi, yang merupakan penyebab utama *Stunting*.

Upaya percepatan penurunan angka *Stunting* di Kota Palembang belum dapat berjalan dengan maksimal. Masih terdapat beberapa kendala dalam pencegahan yaitu beragam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah belum merata secara utuh kepada Masyarakat hanya pada wilayah atau titik-titik tertentu (Jati, 2023), selain itu kendala lain terletak pada pola pikir dan kebiasaan buruk dari Masyarakat. Terjadinya kasus *Stunting* ini diakibatkan oleh kebiasaan buruk oleh Masyarakat. Maka dari itu diperlukan upaya penurunan angka *Stunting* yang berkelanjutan dan komprehensif melalui *collaborative governance*. Dalam hal ini termasuk meningkatkan akses terhadap gizi, meningkatkan sanitasi dan kebersihan, dan meningkatkan kesadaran keluarga tentang kesehatan dan gizi anak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan penelitian terletak pada kurangnya penekanan pada aspek-aspek penting seperti kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, keterlibatan sektor swasta, pemahaman bersama yang mendalam mengenai isu-isu yang relevan, serta pendekatan strategis yang komprehensif. Aspek-aspek ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas upaya penurunan stunting di Kota Palembang. Tanpa adanya kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta tanpa adanya strategi yang terintegrasi dan pemahaman yang seragam mengenai masalah stunting, upaya yang dilakukan cenderung menjadi terfragmentasi dan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut yang fokus pada bagaimana memperkuat kolaborasi, melibatkan sektor swasta secara lebih aktif, membangun pemahaman bersama, serta merancang pendekatan strategis yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan stunting di Kota Palembang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam stunting yang terjadi di Indonesia maupun konteks kebijakan menangani stunting. Penelitian Putri & Nurcahyanto (2021) berjudul *Collaborative governance in Managing Stunting in Kalirandu Village, Petraukan Sub-District, Pemalang District*, menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan cukup efektif dengan melihat fenomena dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang

berhubungan dengan sumber daya manusia yaitu partisipasi masyarakat melalui kader stunting yang masih rendah Di Desa Kalirandu, upaya mengani stunting terhambat oleh kurangnya dukungan dari kepala desa dan kendala dalam pengumpulan data, mengakibatkan dominasi yang minim dalam sektor kesehatan. Penelitian Sutikno & Naufal (2023) penelitian ini melibatkan beberapa elemen yang mencakup evaluasi awal dari kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam menangani masalah Stunting di Desa Winduaji, Paguyangan, Brebes. Penelitian ini mencakup penilaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang terkait dengan masalah Stunting, serta analisis mengenai peran kepemimpinan dan jalur komunikasi antara pemerintah setempat dari tingkat desa hingga kabupaten, beserta kerjasama dengan sektor swasta dalam upaya penanggulangan Stunting. Penelitian Ipan et al (2021) menunjukkan bahwa kerjasama dalam mengatasi masalah Stunting di UPTD Puskesmas Ciampel telah berhasil. Ini ditandai dengan dukungan aktif dari sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Meskipun masih ada keterbatasan dalam keterlibatan, masyarakat secara positif menerima upaya pemerintah untuk mengatasi Stunting. Penelitian Sukanti & Faidati (2021) selanjutnya menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta. Berdasarkan hasil penelitian (Yunifar et al., 2022) menunjukan bahwa bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Media Massa, LSM, dan Akademisi sudah baik komunikasi yang dilakukan terjalin dengan baik, serta hasil kolaborasi yang dilakukan berdampak baik karena prevalensi Stunting selalu turun dari tahun ke tahun hanya saja yang menjadi penghambat dalam Penanggulangan Stunting adalah terkait dengan mobilitas penduduk di Kota Surabaya yang sangat tinggi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni upaya penanganan stunting melalui kebijakan *collaborative governance* yang seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Metode yang digunakan menggunakan juga berbedadengan penelitian Astuti, Agustino, maupun Khadijah dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari (Ansell & Gash, 2008) yang menyatakan bahwa proses kolaboratif dapat terjadi dengan negosiasi, membangun kepercayaan dan komitmen, memahami tantangan yang dihadapi, serta membuat rencana dan menemukan fakta disaat bersamaan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan angka *Stunting* di Kota Palembang dan mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya menciptakan kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dalam upaya penurunan angka *Stunting* di Kota Palembang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didasarkan pada pendekatan induktif adalah pilihan yang tepat. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative governance* dalam upaya penurunan angka *Stunting* di kota Palembang.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari hasil observasi dan wawancara kepada pihak terkait. Kemudian Peneliti menggunakan buku, situs web, dan dokumen pemerintah sebagai sumber data sekunder dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini situasi yang akan diteliti oleh penulis adalah struktur dan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga kesehatan, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam penanganan *Stunting* di Kota Palembang. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan *Stunting* Pemerintah Kota Palembang telah membentuk Tim percepatan penanganan *Stunting* tingkat kota Palembang dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 Peraturan ini dibuat untuk mempercepat penurunan angka *Stunting*. Proses *Collaborative governance* antara DPPKB dan pihak non pemerintah lain.

3.1. Kondisi Awal

Kondisi awal yang terjadi pada kolaborasi antara DPPKB dan pihak non pemerintahan yaitu di pengaruhi oleh fenomena *Stunting* yang terjadi. Kolaborasi yang akan dilakukan dipengaruhi juga oleh target nasional angka *Stunting* dibawah 14% pada tahun 2024 dan target pemerintah kota Palembang menjadikan kota Palembang menjadi kota bebas *Stunting* pada tahun 2024. Terkait kolaborasi yang dilakukan DPPKB berperan sebagai *leading sector* dalam proses kolaborasi. Sedangkan pihak swasta atau pihak non pemerintah adalah pihak yang membantu dalam jalannya proses kolaborasi dalam upaya percepatan penurunan angka *Stunting*.

Dalam upaya percepatan penurunan angka *Stunting* dan mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu dibawah angka 14% diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan dan berjalan secara konsisten. Kolaborasi ini bukan dilakukan oleh pihak pemerintah antar opd saja, pemerintah khususnya DPPKB hanya berperan sebagai *leading sector*. Kolaborasi berjalan dengan baik karena banyak bantuan dari pihak non pemerintahan seperti rumah makan penyedia makan gratis, radio sonora sebagai pihak media yang menyebarkan dan mensosialisasikan informasi terkait *Stunting* kepada masyarakat, dan bahkan pihak kepolisian dan TNI yang menjadi bapak asuh *Stunting*.

Apabila kolaborasi antara DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dan pihak non-pemerintahan dipengaruhi oleh fenomena *Stunting* yang terjadi, serta target nasional untuk menurunkan angka *Stunting* di bawah 14% pada tahun 2024 dan target pemerintah kota Palembang untuk menjadikan Palembang sebagai kota bebas *Stunting* pada tahun 2024. DPPKB berperan sebagai *leading sector* dalam proses kolaborasi, sedangkan pihak swasta atau non-pemerintah membantu dalam upaya percepatan penurunan angka *Stunting*. Kolaborasi yang berkelanjutan dan konsisten diperlukan untuk mencapai target tersebut, dan tidak hanya melibatkan pemerintah antar OPD, tetapi juga pihak non-pemerintah seperti rumah makan, media, kepolisian, dan TNI.

Selain itu hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota dinas kesehatan kota Palembang, yang mana diketahui jika Dinas Kesehatan Kota Palembang menyadari bahwa permasalahan *Stunting* tidak dapat ditangani sendiri oleh pihaknya. Dibutuhkan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) sebagai instansi yang fokus pada isu kependudukan dan keluarga berencana. Dinas Kesehatan melihat perlunya upaya yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk menekan angka *Stunting* di Kota Palembang. Hal ini didasari oleh tingginya angka prevalensi *Stunting* di Kota Palembang yang masih berada di atas rata-rata nasional, mencapai sekitar 30% pada tahun 2022.

Dengan berkolaborasi bersama DPPKB dan pihak-pihak lain, diharapkan dapat dilakukan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani masalah *Stunting*.

3.2. Desain Kelembagaan

Desain institusional atau kelembagaan ini mencakup pedoman yang disepakati untuk dijalankan bersama dengan transparansi dan konsistensi, yang dibangun melalui kolaborasi yang melibatkan partisipasi aktor yang memiliki peran yang setara dalam pengambilan keputusan. Pemimpin mendorong pemangku kepentingan untuk bernegosiasi dengan itikad baik dan mencari kepentingan, kompromi, dan pencapaian bersama. Mengatur kerja sama bersama dengan tujuan mencapai kesepakatan, walaupun seringkali kesepakatan tidak tercapai. Perencanaan lembaga merujuk pada pedoman dasar dan aturan kerja sama terkait dengan prosedur kerja sama hukum, transparansi dalam proses, partisipasi peserta, dan eksklusivitas forum. (Wright, 2020).

Menurut Ansell & Gash (2008) bahwa aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia. Berdasarkan dari beberapa regulasi yang sudah disepakati mengenai penanganan *Stunting* mulai dari Peraturan Presiden No 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi. Di dalam peraturan tersebut, disebutkan tentang upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Ini melibatkan penggalangan partisipasi dan kepedulian dari berbagai pihak secara terencana dan terkoordinasi, khususnya untuk meningkatkan gizi masyarakat pada seribu hari pertama kehidupan.

Selain itu, terdapat Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka *Stunting*. Perpres tersebut menjadi dasar hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan *Stunting* yang telah diterapkan sejak tahun 2018 (Indonesia, 2021). Tujuan dari Perpres ini adalah untuk memperkuat kerangka intervensi dan struktur kelembagaan dalam upaya menangani masalah *Stunting* yang semakin meresahkan masyarakat. Diharapkan bahwa dengan adanya Perpres ini, pemerintah, terutama di tingkat daerah, akan memberikan perhatian yang lebih terhadap implementasi dari Perpres No. 72 Tahun 2021 tersebut.

Desain institusional dalam kolaborasi Program penurunan *Stunting* memiliki dua aspek kunci, yaitu kebijakan dasar dan transparansi proses kolaborasi. Salah satu kebijakan dasarnya adalah Keputusan Walikota Palembang Nomor: 48/KTPS/DPPKB/2022 mengenai percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota. Dalam kerjasama ini, transparansi dipraktikkan baik secara internal maupun eksternal (Walikota Palembang, 2022). Transparansi internal melibatkan pembukaan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat, terutama melalui pertemuan dari DPPKB sebagai leading sector.

Di samping itu, kejelasan dalam kerjasama ini mencakup transparansi mengenai proses kolaboratif, seperti pembuatan dan pengaturan materi sosialisasi untuk Program Penurunan *Stunting*, yang mudah diakses melalui berbagai saluran seperti berita, pelatihan, dan lokakarya yang diadakan oleh mitra non-pemerintah, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sumsel Babel. Ini melibatkan penyediaan pelatihan bagi kader pelaksana dan masyarakat secara langsung, serta penyebaran informasi terbaru. Meskipun data prevalensi *Stunting* Kota Palembang masih sulit diakses oleh publik, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas data terus dilakukan.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan yang memfasilitasi menjadi faktor penting dalam kolaborasi, di mana pemimpin memainkan peran penting dalam menjaga integritas, memfasilitasi konsensus, dan berperan sebagai mediator dalam diskusi serta negosiasi. Ini juga menjamin bahwa pemimpin yang memegang

peran sesuai kapasitasnya dapat sukses dalam kerja sama. Untuk mendorong pemangku kepentingan untuk bekerja sama dengan baik, kepemimpinan sangat penting. Kepemimpinan yang bersifat fasilitatif adalah komponen yang mendorong keberhasilan kolaborasi dalam indikator ini. Untuk memastikan bahwa setiap pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan efektif demi mencapai tujuan bersama, DPPKB berperan sebagai sektor yang memimpin dalam koordinasi. Selain itu, DPPKB juga bertugas mengurangi rasa ego sektoral yang mungkin timbul pada tahap awal kerjasama.

Anggota dinas kesehatan Kota Palembang, mengemukakan bahwa kepemimpinan yang bersifat memfasilitasi tercermin saat ada sesi dialog bersama. Ini menjadi penting karena kemampuan kepemimpinan tersebut untuk bertindak sebagai penengah ketika ada ketegangan antara instansi atau masalah lainnya. Keberhasilan kolaborasi Program Penurunan *Stunting* ini berkat peran penting kepemimpinan yang memfasilitasi dengan baik. Semua sektor yang terlibat berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing.

Sementara itu pihak lembaga masyarakat yaitu kader posyandu menjelaskan bahwa kepemimpinan fasilitatif ini yang mendorong kerja sama. Sebab pertama adalah kebanggaan sektoral antar instansi, yang menghalangi proses kerja sama ini. Ini terjadi di awal program penurunan *stunting*. Karena itu, penurunan *stunting* ini kemudian berada langsung di bawah DPPKB. Sebab, fungsi koordinasi daerah berada di DPPKB. Jika Program Penurunan *Stunting* berada di bawah tanggung jawab salah satu instansi pemerintah, seperti Dinas Kesehatan, maka akan sulit untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah lain karena keduanya melakukan kegiatan teknis.

Untuk mencapai tujuan Program penurunan *stunting*, kepemimpinan fasilitatif juga membantu membangun kegiatan. Sebuah contoh adalah pelatihan bagi calon pemimpin tentang cara menggunakan sistem informasi daring untuk mengumpulkan data tentang masalah gizi buruk dan kesehatan ibu dan anak. Monitoring dan evaluasi program akan menjadi lebih mudah dengan kegiatan ini.

3.4. Proses Kolaborasi

Faktor penting dalam proses kolaborasi adalah bahwa itu dimulai dengan percakapan tatap muka yang berbasis kepercayaan. Setelah percakapan tatap muka yang berhasil, suatu kepercayaan akan membangun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi komitmen dalam proses kolaborasi. Setelah para stakeholder berkomitmen tinggi, akan ada pemahaman bersama tentang perumusan masalah, nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para stakeholders memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi.

Dalam penelitian ini menggunakan model kolaborasi (Ansell & Gash, 2008) dimana terdapat lima variable yang akan dijabarkan sebagai berikut:

a. *Face to dialog*

Pertemuan langsung antara para pemangku kepentingan adalah tahap awal dalam *collaborative governance*. Melalui dialog ini, mereka berinteraksi untuk mengenali peluang, masalah, kekurangan, serta manfaat yang ingin mereka raih dengan mencapai kesepakatan bersama. Dimulai dengan pertemuan para stakeholder yang akan terlibat dalam proses kolaborasi dalam penanganan *stunting*, dialog secara intensif untuk penanggulangan *stunting* merupakan awalan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi. Selain itu, penting untuk menunjukkan sektor utama yang bertanggung jawab untuk mengatur dialog. Dalam konteks ini, sektor pemerintah bertindak sebagai penggerak, sedangkan sektor swasta bertindak sebagai pendukung. (Ipan et al., 2021).

b. *Trust Building*

Membangun kepercayaan dan keterlibatan tidak dapat dianggap sebagai tahapan terpisah dari interaksi tatap muka. Beradaptasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat dapat

mencegah konflik. Selanjutnya, peran kepemimpinan fasilitatif harus menjadi tempat yang menciptakan kepercayaan diantara para pemangku kepentingan yang terlibat. (Cahya, 2019).

Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mengatakan bahwa dalam membina hubungan kepercayaan di antara pihak-pihak terkait, diperlukan berbagai diskusi dan pertemuan tatap muka agar komunikasi dapat terjalin dengan baik. Meskipun terdapat banyak pendapat dan argumen, upaya untuk menyatukannya tetap dilakukan. Dukungan dari kolaborasi sebelumnya dalam program lain juga mempermudah proses ini. Keterbukaan menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan di antara pihak-pihak terkait.

c. *Commitment To the Process*

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan kerja sama adalah komitmen dari semua pihak yang terlibat. Komitmen dibangun karena masing-masing instansi tahu bahwa mereka saling bergantung satu sama lain dan bahwa tujuan akan lebih mudah dicapai jika orang bekerja sama daripada melakukannya sendiri. Menurut penelitian, pemerintah memulai inisiatif membentuk sebuah program yang diatur dalam Keputusan Walikota Palembang Nomor 48/KTPS/DPPKB/2022. Tujuan program tersebut adalah untuk menjaga komitmen dan memastikan akuntabilitas kinerja para pelaksana dalam upaya penurunan tingkat stunting di kota tersebut. Selain dari hal tersebut, keberhasilan kerja sama dalam berkomunikasi secara langsung dan membangun kepercayaan satu sama lain juga berkontribusi pada komitmen terhadap proses. Semakin seseorang terlibat dalam proses kerja sama, semakin besar juga komitmennya terhadap hubungan tersebut, karena terbentuknya rasa saling ketergantungan dalam menjalankan program bersama.

d. *Shared Understanding*

Para pihak yang terlibat dalam kerja sama harus saling memahami tujuan, permasalahan, dan nilai-nilai yang mendasari kerja sama tersebut. Idealnya, mereka memiliki pemahaman yang seragam saat mencari solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Kolaborasi efektif dalam upaya menangani stunting memerlukan ketergantungan dan pemahaman tujuan bersama antara semua sektor terlibat. Dengan kata lain, keberhasilan program penurunan stunting tergantung pada kesadaran bahwa setiap sektor saling mendukung satu sama lain, tanpa menganggap dirinya mandiri. Pertukaran pemahaman, informasi, data, dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing sektor yang terlibat dalam Program penurunan Stunting mendukung perkembangan program dan memfasilitasi proses kolaborasi yang efektif dan solutif terhadap tantangan yang dihadapi serta yang mungkin timbul.

e. *Intermediated Outcome*

Output awal yang menunjukkan kolaborasi berhasil dapat diamati dari pencapaian awal, perencanaan strategis, dan faktor lainnya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Palembang, Altur, optimis bahwa Palembang dapat mencapai target SDGs nasional tahun 2024. Keyakinannya didasarkan pada keberhasilan penurunan kasus stunting menjadi 16,1 persen meskipun dihadapkan pada keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Palembang telah membentuk tim pendampingan keluarga yang terdiri dari 2.940 orang, termasuk kader posyandu, tenaga kesehatan, dan bidan, yang tersebar di 107 kelurahan. Selain itu, pimpinan instansi TNI, Polri, dan BUMD juga dilibatkan sebagai duta bapak asuh anak stunting di setiap kecamatan. telah mencapai pencapaian awal yang memuaskan. Seiring waktu berjalan, program ini yang bertujuan untuk mengurangi *stunting* terus menunjukkan perkembangan yang positif.

3.5. Tantangan dan Upaya dalam Menciptakan Kolaborasi

Dalam rangka mempercepat penurunan angka *Stunting*, dibutuhkan kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat

sipil, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghambat upaya kolaborasi tersebut. Berikut ini adalah hambatan-hambatan dalam upaya menciptakan kolaborasi yang efektif dalam upaya percepatan penurunan angka *Stunting*:

a. Perbedaan Pemahaman dan Prioritas Antar Pemangku Kepentingan

Setiap pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat, memiliki latar belakang, kepentingan, dan perspektif yang berbeda-beda terhadap isu *Stunting*. Perbedaan pemahaman dan prioritas ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengkoordinasikan dan menyatukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menurunkan angka *Stunting* secara efektif. Pemahaman yang tidak sejalan di antara pemangku kepentingan dapat menghambat upaya kolaborasi dan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Dalam mengatasi hambatan tersebut berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan.

- a) Forum dialog teratur
- b) Peta jalan (*roadmap*) bersama
- c) Pelatihan dan *workshop*

b. Koordinasi yang Kurang Optimal

Koordinasi yang lemah dapat menghambat sinergi dan integrasi program-program yang dijalankan oleh berbagai pihak. Koordinasi yang lemah juga dapat terjadi antara pemerintah daerah dengan sektor swasta maupun organisasi masyarakat sipil. Kurangnya komunikasi dan sinkronisasi program dapat menyebabkan duplikasi, tumpang tindih, atau bahkan kesenjangan dalam upaya penanganan *Stunting*. Perbedaan bahasa, istilah, dan cara penyampaian informasi di antara pemangku kepentingan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat proses pengambilan keputusan bersama. Selain itu, kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi di antara pemangku kepentingan juga dapat menghambat kolaborasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil.

- a) Tim koordinasi multi-sektor
- b) Platform komunikasi digital
- c) Sistem pelaporan terbuka

c. Keterbatasan Sumber Daya

Dari segi anggaran, pemerintah daerah Kota Palembang mungkin menghadapi keterbatasan dana untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi program-program pencegahan dan penanganan *Stunting*. Sehingga menghambat cakupan dan kualitas intervensi yang dapat dilakukan, seperti penyediaan makanan tambahan, pelatihan kader, atau pengadaan sarana kesehatan. Selain itu, keterbatasan tenaga profesional, seperti tenaga gizi, tenaga kesehatan, dan penyuluh, juga dapat menjadi hambatan. Keterbatasan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang kurang memadai, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota, dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan pencegahan dan penanganan *Stunting*.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya dan mencapai hasil yang diinginkan.

- a) Optimalisasi anggaran
- b) Pelibatan komunitas
- c) Kemitraan dengan sektor swasta
- d) Budaya Silo dan Ego Sektoral

Budaya silo mengacu pada kecenderungan masing-masing sektor atau organisasi untuk bekerja secara terpisah dan terfragmentasi, tanpa koordinasi yang memadai dengan pihak lain. Ego sektoral merujuk pada sikap dan pandangan yang terlalu mementingkan kepentingan dan agenda masing-masing sektor, tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama atau perspektif

yang lebih luas. Hal ini dapat menghambat upaya kolaborasi yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah *Stunting* yang kompleks.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

- a) Pembentukan aliansi dan koalisi
- b) *Incentive system*
- c) Sosialisasi dan edukasi

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program penanganan stunting di Kota Palembang memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Program penanganan stunting ini juga merupakan salah satu sarana pengembangan diri bagi para pemuda di Kota Palembang. Penulis menemukan temuan penting yakni pemerintahan kota Palembang berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dan masyarakat, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Sama halnya dengan temuan Putri bahwa kolaborasi yang baik berperan penting mendorong masyarakat untuk peduli akan kesehatan dan gizi, memfasilitasi kaum muda untuk memahami potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat terkait stunting, melakukan jejaring dan mengadvokasi diri mereka sendiri, pemuda Kota Palembang merupakan kunci berjalannya program penanganan stunting di Kota Palembang.

Layaknya program lainnya, program penanganan stunting ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah pemanfaatan media digital dalam edukasi dan sosialisasi stunting di Kota Palembang diakui belum maksimal, salah satunya dikarenakan oleh faktor perbedaan pemahaman, sumber daya yang terbatas, dan koordinasi yang kurang optimal, layaknya temuan (Sukanti & Faidati, 2021). Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah alokasi anggaran dan dukungan oleh pihak swasta dan atau pihak berkepentingan, serta adanya dorongan motivasi imbalan yang diberikan pemerintah daerah bagi yang mampu menyelenggarakan program dengan baik. Hal ini yang membuat masyarakat berlomba untuk berpartisipasi mensukseskan program penanganan stunting dengan berbagai kreasi dan saling bergotong royong memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing kelurahan untuk menampilkan program penanganan stunting terbaik. Artinya pemerintah setempat berhasil menumbuhkan kesadaran atau sukarelawan masyarakat sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat yang berbasis kesehatan (*voluntarism* dan *independence*).

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu mencerdaskan masyarakat kota Palembang tentang pentingnya gizi dan kesehatan, meningkatnya SDM secara masif, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat secara tidak langsung layaknya penelitian Ipan yang menemukan peran kolaborasi *stunting* di puskesmas membuat masyarakat mampu merumuskan kebutuhan informasi gizi, filterisasi informasi, menyimpan dan menemu kembalikan informasi, efektifitas dan efisiensi informasi, sharing knowledge, membantu para keluarga memperbaiki kesehatan.

IV. KESIMPULAN

Proses *collaborative governance* dalam menangani stunting di Kota Palembang didasarkan pada Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 untuk mempercepat penurunan angka stunting. DPPKB memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan kolaborasi, yang melibatkan lembaga non-pemerintah untuk tujuan bersama dalam menurunkan stunting di bawah 14% pada tahun 2024 dan menjadikan Palembang bebas stunting pada tahun yang sama. Transparansi, konsistensi, dan

kepemimpinan yang fasilitatif disoroti sebagai elemen penting untuk kolaborasi yang efektif dan penanganan stunting yang sukses di kota Palembang. Kolaborasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan sangat penting dalam mengatasi tantangan untuk mengurangi angka stunting di Kota Palembang. Mengatasi hambatan seperti perbedaan pemahaman, koordinasi yang kurang optimal, sumber daya yang terbatas, serta silo dan ego sektoral sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Strategi yang dilakukan meliputi dialog rutin, pengembangan peta jalan bersama, peningkatan koordinasi, dan komunikasi yang lebih baik melalui tim lintas sektor, platform digital, optimalisasi sumber daya, pelibatan masyarakat, kemitraan sektor swasta, dan pembentukan koalisi untuk meningkatkan upaya kolaboratif dan mengurangi angka stunting secara efisien di Kota Palembang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, dan musibah yang dialami peneliti saat melakukan penelitian, yang mengharuskan peneliti melakukan operasi. Sehingga adanya keterbatasan dalam proses penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada semua narasumber yang terlibat dalam penelitian ini yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dinas Kesehatan Kota Palembang. (2022). *Profile Kesehatan Kota Palembang*. Dinkes.Palembang. <https://dinkes.palembang.go.id/>
- Indonesia, P. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Jakarta : Republik Indonesia.
- Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(3), 383–391. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i3.9665>
- Jati, R. P. (2023). *Keberadaan Pendamping Keluarga dan Bapak Asuh Pangkas Angka*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/27/keberadaan-pendamping-keluarga-dan-bapak-asuh-pangkas-angka-stunting>
- Kemendes. (2022). *BUKU SAKU Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Putri, E. N., & Nurcahyanto, H. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(2), 68–85. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i2.30594>
- Santrock, J. W. (2002). *Life Span Development : Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 91–113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>
- Sutikno, C., & Naufal, A. (2023). Proses Collaborative governance Penanggulangan Stunting Di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2(1), 1–9. <http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jd/article/view/>

3840

- Walikota Palembang. (2022). *Keputusan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kelurahan Lokus Percepatan Penurunan Stunting*. Palembang : Pemerintah Walikota Palembang.
- Wright, E. (2020). *Jim Crow sociology: The Black and southern roots of American sociology (Vol. 76)*. Cincinnati. OH: University of Cincinnati Press.
- Yunifar, A. T., Kusbandrijo, B., & Puspaningtyas, A. (2022). Collaborative governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(4), 148–158. <https://www.aksiologi.org/index.php/praja/article/view/1120>

